

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Dwiyanto, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Agus Hendrayady, 2020, *Pelayanan Publik Di Era Tatanan Normal Baru*, Bandung, CV. Media Sains Indonesia
- Ahmad, Et.Al, 2022, *Metodologi Penelitian*, Purwokerto, CV. Pena Persada,
- Andi Setyo, 2023, *Succes Story Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik di Daerah*, Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Anwar, Et.Al, 2021, *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Budhi Masthuri, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, PT. Pradnya Paramita
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Cekli Setya, Et.Al, 2016, *Penjelasan Hukum Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
- H.Kriswahyu, Et.Al, 2017, *Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 Survei Ombudsman RI*, Ombudsman Republik Indonesia
- H.M.Idris, 2015, *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*, De La Macca
- Hamdan, Et.Al, 2020, *Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru*, CV. Media Sains Indonesia
- Lailul dan Ilmi, 2020, *Manajemen Pelayanan Publik*, UMSIDA PRESS
- M.Khoirul, 2013, *Suara Ombudsman RI Mengawal Pelayanan Publik untuk Republik*, Ombudsman Republik Indonesia
- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Mokhamad, Et.Al, 2023, *Ombudsprudensi*, Ombudsman Republik Indonesia
- Muhammad, Arin, dan Nurhayati, 2020, *Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis

Muhammad Fitri, Et.Al, 2020, *Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis  
Ridwan H.R, 2007, *Hukum Adminitrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada  
Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cv.Pustaka Setia  
Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni  
Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang  
Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan  
Pendidikan

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019  
tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman  
Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58  
Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan  
Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  
75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

Peraturan Sekjen Kemendikbudristek No 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi  
Teknis, Bentuk, Serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan  
Pemusnahan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan  
Menengah

Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Adat Di Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri

### C. Jurnal

Andi Setyo, 2023, "Permasalahan Pelayanan Publik dan Peran Ombudsman Perwakilan Dalam Pendampingan Aparatur Sipil Negara", Jurnal Ilmiah Wahana Bhakri Praja, Vol. 13, No. 2.

Christmas, Et.Al, 2024, "Analisis Yuridis Terhadap Instansi Pendidikan Yang Melakukan Penahanan Ijazah Menurut Hukum Perdata", Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2, No. 3.

Dicky, Et.Al, 2024, "Analisis Hukum Mengenai Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4.

Fildzah dan Syamsir, 2024, "Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Mendukung Reformasi Birokrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 2.

Fobi dan Lince, 2022, "Efektivitas Peran Ombudsman Ri Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kota Padang", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2.

Haliq, Umar, dan Normajatun, 2017, "Analisis Kasus Mal Administrasi di Ombudsman Ri Perwakilan Kalimantan Selatan Tahun 2013-2015", As Siyasa Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2, No. 1.

Hikma Dian, 2022, "Asas dan Fungsi Pemerintahan, Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi

Pemerintahan dalam Pelayanan Publik”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Jayanti, Mary, dan Nur, 2022, “Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2.

M.Arif, Suranto, 2014, “Optimalisasi Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyadaran Hak Masyarakat Atas Pelayanan Publik”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 1.

M.Rafi, Rahmadani, 2020, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman Ri Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelayanan Publik”, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAD), Vol. 2, No. 4.

Muhamad Azhar, 2015, “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara”, NOTARIUS, Vol. 8, No. 2.

Nuur dan Anis, 2023, “Penerapan Asas-Asas Pelayanan Publik Di Perpustakaan” Jurnal Ilmu Perpustakaan (JIPER), Vol. 5, No.1.

Rangga, Fathur, dan Yudi, 2022, “Kewenangan Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Lampung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 5, No. 1.

Robert, Et.Al, 2015, “PERAHU (Penerangan Hukum)”, Jurnal Ilmu Huku, Vol. 3, No. 2.

Robertho Yanflor, 2015, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance and Clean Government di Pemerintahan Daerah”, *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6

Sari, Et.Al, 2024, “Tantangan dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 4

Solechan, 2019, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 3.

Wicaksono, 2022, Optimalisasi Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyadaran Hak Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Jurnal GeoCivic, Vol.5 No 2

#### **D. Internet**

Strategi Mewujudkan Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pelayanan Publik,

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>

Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, *Temukan Maladministrasi Penyerahan Ijazah di SMAN, SMKN, dan MAN, 2025*, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-sumbar-temukan-maladministrasi-penyerahan-ijazah-di-sman-smkn-dan-man>

Artikel Memahami Kapasitas Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahami-kapasitas-ombudsman-sebagai-lembaga-pengawas-pelayanan-publik>

Artikel Berita Penahanan Ijazah Dalam Perspektif Hukum dan Pelayanan Publik <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--penahanan-ijazah-dalam-perspektif-hukum-dan-pelayanan-publik>

